



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**



**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan pencapaian visi misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sekaligus sebagai pedoman penyusunan Anggaran serta merupakan acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

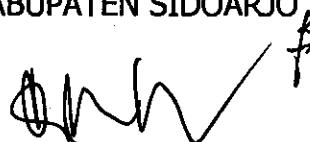
Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Renstra BPKAD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, Renja Tahun 2023 serta rencana estimasi program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 serta tujuan dan sasaran dari masing-masing program. Pada tahun 2023 BPKAD merencanakan 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan yang dijabarkan lebih lanjut dalam 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan.

Disusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 diharapkan menjadi bahan bagi Aparatur BPKAD Kabupaten Sidoarjo dalam mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan bersama untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 ini tentunya tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami nantikan guna perbaikan kinerja organisasi dimasa yang akan datang.

Sidoarjo, April 2022

Pt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



CHUSNUL INAYAH, SE

NIP. 19720317 199602 2001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	22
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat	36
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	37
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	38
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan	46
BAB IV PENUTUP	53
LAMPIRAN :	
Tabel : 2.1. Hasil Kinerja BPKAD Kabupaten Sidoarjo Periode 2016-2021	
Tabel : 2.2. Indikator Kinerja Tujuan BPKAD	
Tabel : 2.3. Indikator Kinerja Utama BPKAD	
Tabel : 2.4. Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2021	
Tabel : 2.5. Laporan Realisasi Anggaran	
Tabel : 2.6. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	
Tabel : 2.7. Rancangan Awal BPKAD Th Anggaran 2022 Setelah Rasionalisasi	
Tabel : 3.1. Tujuan, Indikator dan Target	
Tabel : 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang – undang tersebut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, yang di dalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan salah satu tahapan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk periode satu tahun ke depan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Dokumen Renja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Renja SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja SKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan yang memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor (70) Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Pemerintah Nomor (12) Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);

15. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 6).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPKAD Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD yang telah ditetapkan untuk satu tahun

mendatang, Renja sekaligus sebagai acuan dan pedoman penyusunan Anggaran BPKAD dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk itu, tujuan Penyusunan Renja BPKAD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menegaskan tujuan, sasaran, program, indikasi kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD Tahun 2023 yang merupakan implementasi dari Renstra BPKAD Tahun 2021 – 2026;
2. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tujuan, sasaran, program, indikasi kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD Tahun 2023;
3. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi serta dalam rangka menilai kinerja organisasi;
4. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan BPKAD dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja (Renja) BPKAD disusun berdasarkan Lampiran VI Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.5. Latar Belakang	3
	1.6. Landasan Hukum	4
	1.7. Maksud dan tujuan	5
	1.8. Sistematika Penulisan	6
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
	2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	22
	2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat	36

BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
	3.4 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	37
	3.5 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	38
	3.6 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	43
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
	4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan	46
BAB IV	PENUTUP	53
LAMPIRAN	:	
Tabel	: 2.1. Hasil Kinerja BPKAD Kabupaten Sidoarjo Periode 2016-2021	
Tabel	: 2.2. Indikator Kinerja Tujuan BPKAD	
Tabel	: 2.3. Indikator Kinerja Utama BPKAD	
Tabel	: 2.4. Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2021	
Tabel	: 2.5. Laporan Realissai Anggaran	
Tabel	: 2.6. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	
Tabel	: 2.7. Rancangan Awal BPKAD Th Anggaran 2022 Setelah Rasionalisasi	
Tabel	: 3.1. Tujuan, Indikator dan Target	
Tabel	: 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam melakukan evaluasi kinerja ada tahapan yang harus dilakukan yaitu melalui Pengukuran Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasinya pada masing-masing indikator kinerja sasaran.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi dan melaksanakan fungsi penunjang keuangan di bidang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan;
- e. Pelaksanaan fungsi BUD;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dari uraian tugas pokok dan fungsi tersebut, BPKAD memiliki tugas yang cukup strategis dalam merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Pengkoordinasian penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Perubahannya serta Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Disamping itu, BPKAD juga mempunyai tugas untuk merumuskan perencanaan Belanja, pengelolaan keuangan daerah serta penyelenggaraan perbendaharaan Umum Daerah.

Dari tugas dan fungsi BPKAD diatas, program prioritas dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah : BPKAD ikut serta mendukung pencapaian visi misi dan Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini ditunjukkan melalui misi I (satu) yaitu **"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha"**. Untuk mewujudkan misi tersebut, BPKAD Kabupaten Sidoarjo ikut serta berkontribusi kepada pencapaian program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD Tahun 2021-2026, berikut Program BPKAD yang mendukung :

1. Rp. 6 Juta Operasional Bagi RT, meliputi program :
 - a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Tingkatkan ADD untuk Desa Sejahtera, meliputi program :
 - a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

BPKAD sebagai unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, sesuai dengan Renstra 2016-2021 Indikator Kinerja Utama BPKAD adalah Persentase PD yang patuh dalam penyusunan RAPBD, Persentase PD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang ditetapkan, Rasio PAD terhadap pendapatan daerah, Persentase aset tetap dengan dokumentasi legal, Persentase PD yang tertib tata kelola Barang Milik Daerah (BMD). Sedangkan sesuai Renstra 2021-2026 Indikator Kinerja Utama BPKAD adalah Persentase Laporan keuangan PD yang sesuai SAP, Persentase Aset Tetap Terdokumentasi Legal, berikut kami sajikan Renstra BPKAD 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Hasil Kinerja BPKAD Kabupaten Sidoarjo Periode 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran BPKAD	Target Renstra PD pada tahun					Realisasi Capaian pada tahun					Rasio Capaian pada tahun								
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase PD yang patuh dalam penyusunan RAPBD	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase PD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang ditetapkan	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	93,75%	86,03%	85,42%	81,25%	100%	N/A	93,75%	86%	85%	81%	100%	
3	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	N/A	38,67%	36,21%	27,93%	33%	39,72%	N/A	41,31%	39,12%	38,14%	40,92%	41,26%	N/A	106,83%	108%	137%	124%	103,88%	
4	Persentase PD yang tertib tata kelola Barang Milik Daerah	N/A	98%	100%	100%	100%	100%	N/A	96,76%	98%	100%	100%	100%	N/A	98,73%	98%	100%	100%	100%	
5	Persentase aset tetap dengan dokumentasi legal	N/A	99,73%	99,73%	99,74%	99,75%	99,752%	N/A	100%	99,812%	98,703%	99,483%	99,50%	N/A	100,27%	100,08%	99%	99,73%	99,75%	
6	Persentase Laporan Keuangan OPD yang sesuai SAP	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	100%

Berikut merupakan penjabaran kinerja dari masing-masing indikator :

1. Persentase PD yang patuh dalam penyusunan RAPBD

Pada Indikator Sasaran Persentase PD yang patuh dalam penyusunan RAPBD bahwa realisasi telah mencapai target 100% dari Tahun 2017 hingga 2021 dapat disimpulkan dalam indikator Persentase PD yang patuh dalam penyusunan RAPBD kinerja pada BPKAD telah optimal.

2. Persentase PD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang ditetapkan

Pada Indikator Persentase PD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang ditetapkan bahwa pada Tahun 2017-2021 target 100% tetapi realisasi pada Tahun 2017 yaitu 93,75%, Tahun 2018 yaitu 86,03%, Tahun 2019 yaitu 85,42%, Tahun 2020 yaitu 81,25%, Tahun 2021 yaitu 100%. Dapat disimpulkan pada Tahun 2017 sampai Tahun 2020 realisasi pada indikator Persentase PD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang ditetapkan belum optimal, sedangkan pada Tahun 2021 kinerja pada BPKAD optimal.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala/permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

- a. Penerapan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Prestasi Kerja berdasarkan realisasi penyerapan anggaran;
- b. Pelaksanaan rekonsiliasi penyerapan anggaran setiap triwulan;
- c. Penerbitan surat edaran Sekretaris Daerah tentang percepatan realisasi penyerapan belanja setiap triwulan;
- d. Mekanisme penyerapan belanja <Rp. 50.000.000,00 dengan menggunakan GU.

3. Rasio PAD terhadap pendapatan daerah

Pada Indikator Rasio PAD terhadap pendapatan daerah pada realisasi Tahun 2017 hingga 2021 telah melampaui target yang ditentukan, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pada indikator Rasio PAD terhadap pendapatan daerah telah optimal.

4. Persentase PD yang tertib tata kelola Barang Milik Daerah

Pada Indikator persentase aset tetap dengan dokumentasi legal Tahun 2017 dengan target 98% realisasi 96,76%, Tahun 2018 dengan target 100% dengan realisasi 98% yaitu pada Tahun 2017 dan 2018 kurang optimalnya kinerja pada indikator Persentase PD yang tertib tata kelola barang milik daerah. Tetapi disusul pada Tahun 2019 sampai dengan 2021 dengan target 100% dan realisasi 100% telah mencapai target yang telah ditentukan.

5. Persentase aset tetap dengan dokumentasi legal

Pada Indikator persentase aset tetap dengan dokumentasi legal pada Tahun 2017 dengan target 99,73% dan realisasi 100% bahwa antara target dan realisasi pada kinerja telah optimal yaitu capaian kinerja 100,27%. Pada Tahun 2018 target 99,73% dan realisasi 98,703% bahwa antara target dan realisasi pada kinerja telah optimal yaitu capaian kinerja 100,08%. Namun pada Tahun 2019 target 99,74% dengan realisasi 98,703% dan capaian 99% yang tidak mencapai target yang telah ditentukan. Pada Tahun 2020 target 99,75% dengan realisasi 99,483% dan capaian kinerja 99,73%. Hal ini mengalami kenaikan capaian kinerja pada Tahun 2021 target 99,752% dengan realisasi 99,50% dan capaian kinerja 99,75%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD

a. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Pengukuran Keberhasilan Kinerja Jangka Menengah BPKAD Tahun 2021

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Tujuan BPKAD

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Capaian	Kategori	Penanggung jawab	Keterangan
1	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang berkualitas	Opini atas Audit BPK	100 %	Berhasil	Seluruh OPD	Pemeriksaan Tahun 2021 terhadap LKPD Tahun 2020

Sumber Data : Laporan Hasil Pemeriksaan

Keterangan :

No	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat berhasil
2	90% s.d kurang dari 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup
4	Kurang dari 75%	Kurang

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja tujuan di Tahun 2021, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Sidoarjo mempunyai satu tujuan yaitu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang berkualitas dengan indikator kinerja tujuannya adalah "Opini atas Audit BPK".

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Setelah dilakukan evaluasi dan analisis kinerja, selanjutnya dilakukan analisa terhadap keberhasilan dan kegagalan, yang meliputi penjelasan dalam menghadapi permasalahan – permasalahan pencapaian kinerja, beserta upaya – upaya yang dilakukan, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya.

➤ Tujuan : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang berkualitas

1) Kendala / Permasalahan yang dihadapi :

- a) Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kemampuan dibidang penatausahaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah;
- b) Belum terintegrasinya sistem penganggaran, perbendaharaan, akuntansi dengan manajemen asset;

- c) Kepala OPD selaku pengguna BMD kurang optimal dalam mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;
 - d) Masih banyak aset tanah milik pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang belum bersertifikat dikarenakan Penerbitan sertifikat aset tanah bergantung pada lembaga lain yaitu BPN.
- 2) Upaya yang telah dilakukan :
- a) Verifikasi penempatan kode rekening guna meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penempatan kode rekening;
 - b) Melakukan pendampingan dan mengikutsertakan Pendidikan/ pelatihan kepada para pengelola keuangan terkait pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah;
 - c) Penyusunan petunjuk teknis penatausahaan keuangan daerah;
 - d) Memfasilitasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah, serta mengembangkan aplikasi berdasarkan regulasi, dinamika dan kebutuhan riil;
 - e) Melaksanakan pendampingan dan rekonsiliasi BMD tiap triwulan antara Pengurus Barang OPD dengan staf pengelola BMD;
 - f) Memasang patok tanda batas tanah;
 - g) Peningkatan koordinasi dengan OPD maupun BPN dalam rangka percepatan pengurusan sertifikat tanah atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- 3) Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya :
- a) Pelaksanaan pelatihan/bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b) Rekonsiliasi dan pendampingan penyusunan LKPD;
 - c) Menyusun Petunjuk Teknis Penatausahaan Laporan Keuangan;
 - d) Penyusunan kebijakan akuntansi;
 - e) Pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKSDA) dan SIM Barang Milik Daerah (SIM BMD);
 - f) Pelaksanaan bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah;
 - g) Pelaksanaan rekonsiliasi aset tetap dengan OPD;
 - h) Pemrosesan sertifikat tanah.
- 4) Simpulan atas pencapaian kinerja :
- Opini atas audit BPK terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

kedelapan kalinya setelah 7 (tujuh) tahun berturut – turut, yaitu Tahun 2013 dan 2014 dengan opini WTP dengan paragraph penjelasan, sedangkan 2015 – 2019 menjadi WTP murni tanpa paragraph penjelasan. Untuk lebih meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang berkualitas, pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan beberapa kegiatan pendukung dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pengelolaan dan pelaporan yang lebih akuntabel.

Adapun strategi – strategi untuk mempertahankan opini audit BPK antara lain:

- a) Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran;
- c) Peningkatan kualitas laporan keuangan;
- d) Peningkatan monitoring dan evaluasi;
- e) Peningkatan Pengelolaan barang milik daerah dengan tertib administrasi, tertib jumlah dalam pencatatan dan tertib hukum.

5) Solusi dan upaya perbaikan di tahun mendatang

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisa terhadap capaian kinerja tersebut, maka terdapat catatan dan rekomendasi yang menjadi solusi dan upaya untuk perbaikan dan peningkatan di tahun mendatang, antara lain :

- 1) Peningkatan kompetensi pengelola keuangan daerah dan aset daerah;
- 2) Optimalisasi pemanfaatan SIKSDA dan SIM BMD guna menyajikan laporan yang akurat dan akuntabel;
- 3) Peningkatan koordinasi dengan semua pihak terkait dalam rangka percepatan proses pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

2) Pengukuran Kinerja Tahunan BPKAD Tahun 2021

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama BPKAD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian (%)	Kategori	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai ketentuan, transparan dan akuntabel.	a. Persentase kepatuhan OPD dalam Penyusunan RAPBD	100%	Berhasil	Bidang Anggaran
		b. Persentase OPD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang ditetapkan	100%	Berhasil	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
		c. Persentase asset tetap dengan dokumentasi legal.	99,75 %	Berhasil	Bidang Aset
		d. Persentase OPD yang tertib tata kelola Barang Milik Daerah.	100%	Berhasil	Bidang Aset
		e. Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	103,88 %	Sangat Berhasil	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi

Sumber data: Laporan Bid. Anggaran, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan BMD

Keterangan :

No.	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat berhasil
2	90% s.d kurang dari 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup
4	Kurang dari 75%	Kurang

a. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan serta Solusi dan Upaya Perbaikan di Tahun Mendatang

- Sasaran : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah yang sesuai ketentuan, transparan dan akuntabel.

Secara umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Reviu Rencana Strategis (Reviu-Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 – 2021. Jumlah sasaran BPKAD

yang mendukung tercapainya misi dan visi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 sebanyak 1 (satu) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja yang ditetapkan, dimana terdapat 1 (satu) indikator dengan capaian kinerja "**sangat berhasil**", 4 (empat) indikator dengan capaian kinerja "**berhasil**". Dari masing – masing Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Persentase Kepatuhan OPD dalam penyusunan RAPBD

- a) Kendala/Permasalahan yang dihadapi:
 - 1) Kesalahan penempatan kode rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- b) Upaya yang telah dilakukan:
 - 1) Verifikasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD;
 - 2) Sosialisasi pedoman pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.
- c) Rencana Tindak Lanjut di Tahun Berikutnya:
 - 1) Verifikasi atas RKA OPD;
 - 2) Penyusunan pedoman pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
- d) Simpulan Atas Capaian Kinerja
Capaian kinerja pada Tahun 2021 sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan dan dikategorikan "**berhasil**", adapun untuk Penyusunan APBD tahun 2022 berpedoman pada:
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 2) Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 - 3) Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 4) Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 5) Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.
- e) Solusi dan Upaya Perbaikan Di Tahun Mendatang
 - 1) Verifikasi atas RKA OPD dengan lebih cermat guna meminimalisir tingkat kesalahan dalam penempatan kode rekening.

2. Persentase OPD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang ditetapkan.

- a) Kendala/Permasalahan yang dihadapi :
 - 1) Kurangnya pemahaman OPD terkait tujuan alokasi/pembagian anggaran kas tiap triwulan, sehingga jadwal pelaksanaan kegiatan tidak selaras dengan alokasi anggaran yang direncanakan;
 - 2) Terjadinya penumpukan pengajuan SPM dari OPD pada akhir tahun.
- b) Upaya yang telah dilakukan :
 - 1) Pelaksanaan rekonsiliasi penyerapan anggaran tiap triwulan;
 - 2) Penerbitan surat edaran Sekretaris Daerah nomor 900/9649/438.6.2/2021 tentang Langkah – Langkah pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada akhir Tahun Anggaran 2021 dan persiapan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
 - 3) Mekanisme penyerapan belanja <Rp.50.000.000,00 dengan menggunakan GU.
- c) Rencana Tindak Lanjut di Tahun Berikutnya:
 - 1) Pelaksanaan mekanisme penatausahaan keuangan daerah secara paperless;
 - 2) Rekonsiliasi penyerapan anggaran dengan OPD;
 - 3) Penyusunan petunjuk teknis penatausahaan keuangan;
 - 4) Pelaksanaan bimtek pengelolaan keuangan daerah.
- d) Simpulan Atas Capaian Kinerja
Capaian kinerja Tahun 2021 atas indikator persentase OPD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang ditetapkan, tercapai 100% dengan kategori "**berhasil**".
- e) Solusi dan Upaya Perbaikan Di Tahun Mendatang
 - 1) Pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah dengan menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang terbaru;
 - 2) Penerbitan surat edaran guna percepatan penyerapan anggaran;
 - 3) Penerbitan surat teguran tiap triwulan kepada OPD yang penyerapannya masih rendah.

3. Persentase aset tetap dengan dokumentasi legal.

- a) Kendala/Permasalahan yang dihadapi:
 - 1) Pengguna barang kurang memahami kewajiban dalam pengamanan hukum dan administrasi aset yang berada dalam penguasaannya;
 - 2) Kurang lengkapnya dokumen persyaratan dari OPD untuk pengurusan sertifikat.
- b) Upaya Yang Telah Dilakukan
 - 1) Pemanfaatan aplikasi mapping tanah;
 - 2) Sosialisasi dan atau Bimbingan Teknis kepada pengguna barang terkait hak dan kewajiban dalam pengelolaan dan pengamanan aset (BMD);
 - 3) Koordinasi dengan OPD terkait kelengkapan persyaratan untuk pengurusan sertifikat;
 - 4) Membentuk Tim Penyelesaian Status Kepemilikan BMD;
 - 5) Penelusuran dokumen BMD guna tertib administrasi;
 - 6) Pemasangan papan nama aset daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 - 7) Pemasangan patok batas tanah;
 - 8) Koordinasi secara intensif dengan BPN guna percepatan pemrosesan sertifikat tanah;
 - 9) Penambahan SDM untuk pelaksanaan percepatan pensertifikatan tanah;
 - 10) Penambahan anggaran untuk pensertifikatan tanah.
- c) Rencana Tindak Lanjut di Tahun Berikutnya:
 - 1) Koordinasi secara terus menerus dengan BPN untuk percepatan penerbitan sertifikat;
 - 2) Inventarisasi dan *update* data aset tanah;
 - 3) Pemanfaatan dan optimalisasi aplikasi mapping tanah untuk menginventarisir kepemilikan tanah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- d) Simpulan Atas Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada Tahun 2021 sebesar 99,75% dengan kategori **berhasil**, dimana masih banyak aset tetap berupa tanah yang belum bersertifikat. Sebagaimana tahun – tahun sebelumnya realisasi target indikator ini tidak dapat diperhitungkan capaiannya secara parsial,

karena sepenuhnya dipengaruhi oleh proses sertifikasi yang dilakukan oleh BPN, kecepatan dan realisasi sertifikasi atas bidang tanah tidak dapat ditentukan.

- e) Solusi dan Upaya Perbaikan Di Tahun Mendatang
 - 1) Koordinasi secara terus menerus dengan OPD dan BPN terkait percepatan sertifikasi tanah;
 - 2) Pemanfaatan dan optimalisasi aplikasi mapping tanah untuk menginventarisir kepemilikan tanah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

4. Persentase OPD yang tertib tata kelola Barang Milik Daerah

- a) Kendala / Permasalahan yang dihadapi:
 - 1) Pengetahuan dan wawasan aparatur tentang pengelolaan aset daerah yang masih harus ditingkatkan, karena yang antara lain disebabkan adanya pergantian pejabat pengelola aset daerah;
 - 2) Pengguna barang kurang memahami kewajiban dalam pengamanan hukum dan administrasi aset yang berada dalam penguasaannya.
- b) Upaya yang telah dilakukan:
 - 1) Peningkatan kapasitas SDM pengelola BMD dan sosialisasi penerapan aplikasi SIM BMD bagi para pengurus barang pembantu yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan rekonsiliasi BMD
 - 2) Penyusunan SOP Pemutakhiran data BMD, SOP Pemrosesan Permohonan Penjualan/Pemusnahan Barang Milik Daerah, SOP Penghapusan BMD dan SOP Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Daerah.
 - 3) Pemutakhiran data dan rekonsiliasi laporan BMD;
 - 4) Pemanfaatan aplikasi SIM BMD.
- c) Rencana Tindak Lanjut di Tahun Berikutnya:
 - 1) Rekonsiliasi BMD dengan OPD yang dilaksanakan tiap triwulan;
 - 2) Peningkatan/pengembangan manajemen aset daerah yaitu penatausahaan aset daerah melalui pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Kabupaten Sidoarjo;
 - 3) Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 4) Pemanfaatan dan pengembangan SIM BMD dengan disesuaikan regulasi dan kebutuhan riil.

d) **Simpulan Atas Capaian Kinerja**

Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan gambaran tentang kekayaan daerah, adanya kejelasan status kepemilikan, pengamanan barang daerah, peningkatan PAD dari pemanfaatan aset daerah. Pemerintah Daerah wajib melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun target kinerja untuk Tahun 2021 atas indikator persentase OPD yang tertib tata Kelola Barang Milik Daerah tercapai 100% dengan kategori "**berhasil**".

e) **Solusi dan Upaya Perbaikan Di Tahun Mendatang**

- 1) Peningkatan/pengembangan manajemen aset daerah yaitu penatausahaan aset daerah melalui pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Kabupaten Sidoarjo;
- 2) Rekonsiliasi BMD antara BPKAD dengan OPD secara berkala;
- 3) Pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan BMD.

5. Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah

a) **Kendala/Permasalahan Yang Dihadapi**

Melalui pengelolaan BMD secara tepat guna dan optimal dapat berperan penting guna mendorong optimalisasi dan maksimalisasi perolehan Pendapatan Asli Daerah, sehingga menunjang dalam memperkuat peningkatan keberhasilan ekonomi daerah dan BPKAD turut berperan dalam hal tersebut. Terdapat kendala/permasalahan yang berkaitan dengan pemanfaatan BMD dalam optimalisasi perolehan PAD, antara lain:

- Terdapat perjanjian sewa yang belum diperbaharui dan penyewa memperpanjang sewa dengan besaran nilai sebelum dilakukan appraisal.

b) **Upaya Yang Telah Dilakukan**

- Penilaian aset melalui pihak ketiga (KPKNL/KJPP) guna percepatan penentuan besaran sewa bangunan/lahan;
- Koordinasi dengan OPD selaku pengguna barang guna percepatan pembuatan perjanjian sewa;
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan BMD;

- Pembentukan tim perencanaan barang milik daerah dan tim pemanfaatan barang milik daerah.
- c) Rencana Tindak Lanjut di Tahun Berikutnya
- Koordinasi dengan OPD dalam pelaksanaan pemanfaatan BMD;
 - Sosialisasi/bimtek tentang Pemanfaatan BMD;
 - Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pemanfaatan BMD;
 - Penilaian aset melalui pihak ketiga (KPKNL/KJPP).
- d) Simpulan atas pencapaian kinerja :
- Capaian kinerja atas rasio PAD terhadap pendapatan daerah tercapai 103,880% dengan kategori "**sangat berhasil**".
- e) Solusi dan Upaya Perbaikan di Tahun Mendatang
- Koordinasi dengan OPD pengguna barang terkait pemanfaatan BMD.
 - Membentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah.

b. Analisis Pencapaian Program Pendukung

- Sasaran 1 : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah yang sesuai ketentuan, transparan dan akuntabei.

Tabel 2.4
Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2021

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	Program Peayanan Kesekretariatan	Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap pelayanan kesekretariatan	80%	100%	125%	Sangat Berhasil
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu dalam penyusunan penganggaran (APBD dan PAPBD)	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Berhasil
		% dokumen penganggaran yang telah dipublikasikan melalui media publik	100%	100%	100%	Berhasil
		% OPD yang tepat waktu dalam menentukan kode rekening pada RKA OPD	100%	100%	100%	Berhasil
		% OPD yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan berbasis SAP (Akrual)	100%	100%	100%	Berhasil

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
		% OPD yang tepat waktu penyerapan anggaran sesuai anggaran yang kas yang ditetapkan	100%	100%	100%	Berhasil
		Ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Berhasil
4	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah	Prosentase pemindahtanganan BMD yang diproses melalui lelang umum	100%	100%	100%	Berhasil
		Prosentase aset tetap (tanah) dengan dokumentasi legal	32,81%	19,30%	58,82%	Kurang
		Prosentase OPD yang tepat waktu dalam penyampaian laporan BMD	100%	100%	100%	Berhasil

Sumber data : Laporan sekretariat, Laporan Bidang Anggaran, Laporan Bidang Perbendaharaan & Akuntansi, Laporan Bidang Aset

Keterangan :

No.	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat berhasil
2	90% s.d kurang dari 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup
4	Kurang dari 75%	Kurang

Untuk mendukung atas target kinerja tujuan dan sasaran tersebut diatas dilakukan melalui 3 (tiga) program dengan 10 (sepuluh) indikator. Sebagian besar target kinerja dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil dan berhasil, namun untuk 11 (sebelas) indikator kinerja program, terdapat 1 (satu) indikator dengan kategori capaian kinerja "**kurang**",

Indikator kinerja program dengan kategori capaian kurang adalah Persentase aset tetap (tanah) yang telah diinventarisasi dalam laporan BMD. Adapun yang dimaksud dengan aset tetap (tanah) yang telah diinventarisasi dalam laporan BMD merupakan aset tetap (tanah) yang telah bersertifikat, ketidaktercapaian tersebut dikarenakan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- 1) Kurang komitmen OPD dalam pengamanan aset;
- 2) Kurang lengkapnya dokumen pendukung pengurusan sertifikat yang disampaikan OPD.

Solusi yang telah dilakukan untuk permasalahan tersebut diatas antara lain:

- 1) Membentuk Tim Penyelesaian Status Kepemilikan Aset;
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait;
- 3) Penelusuran dokumen guna tertib administrasi;
- 4) Koordinasi dengan BPN untuk percepatan proses sertifikasi tanah.

c. Laporan Realisasi Anggaran

Tabel 2.5
Laporan Realisasi Anggaran

Program	Anggaran	Realisasi	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.515.163.214,00	13.087.201.919,00	96,83
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	750.421.604.438,00	728.181.098.983,07	97,04
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.066.199.196,00	2.350.931.433,00	76,67
Total	767.002.966.848,00	743.619.232.335,07	96,95

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2021 sebesar Rp. 743.619.232.335,07 dengan capaian sebesar 96,95% dari pagu anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. 767.002.966.848,00.

2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD Kabupaten Sidoarjo

Rencana Strategis (Renstra) pada suatu organisasi memberikan panduan arah dan prioritas strategis organisasi lima tahun kedepan. Arah dan prioritas organisasi ini sangat bergantung pada harapan dan tuntutan para *stakeholder* terhadap organisasi.

Pada sub-bab Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, akan dianalisa terkait masalah pokok atau masalah makro Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Masalah atau penyebab dari timbulnya masalah makro dan akar masalah atau penyebab masalah yang lebih rinci. Masalah pokok, masalah dan akar masalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ditunjukkan dalam tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Menjaga dan mengoptimalkan kinerja BPKAD, dalam mengelola keuangan dan aset daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pemahaman penganggaran, penatausahaan keuangan dan BMD di masing – masing PD belum optimal; 2. Masih banyak aset tanah milik Pemkab Sidoarjo yang belum bersertifikat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran terkait pengelolaan keuangan PD; 2. Belum terintegrasinya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah; 3. Penerbitan sertifikat aset tanah bergantung pada lembaga lain yaitu BPN; 4. Setiap tahun barang milik daerah Pemkab Sidoarjo akan terus bertambah.

Berdasarkan hasil pemetaan permasalahan dalam tabel diatas dapat diketahui bahwa isu-isu strategis pada BPKAD Kabupaten Sidoarjo :

1. Tingkat pemahaman penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah di masing – masing PD belum optimal;
2. Kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan dan BMD;
3. Belum terintegrasinya sistem penganggaran, perbendaharaan, akuntansi dengan manajemen aset;
4. Masih banyak aset tanah milik pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang belum bersertifikat dikarenakan Penerbitan sertifikat aset tanah bergantung pada lembaga lain yaitu BPN.

Upaya yang dilakukan BPKAD untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Melaksanakan rekonsiliasi BMD tiap triwulan antara Pengurus Barang OPD dengan staf pengelola BMD;
2. Pelaksanaan Bimbingan Teknik pengelolaan keuangan daerah;
3. Menyusun petunjuk teknis penatausahaan keuangan daerah;
4. Pelaksanaan inventarisasi BMD;
5. Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
6. Memasang papan nama aset atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
7. Pengurusan sertifikat tanah atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan hal tersebut diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah ke depan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

- (1) Pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan Sistem Manajemen Aset Daerah;

- (2) Pelaksanaan rekonsiliasi aset tetap yang berasal dari dana BOS;
- (3) Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (4) Rekonsiliasi dan pendampingan penyusunan LKPD;
- (5) Menyusun Petunjuk Teknis Penatausahaan Laporan Keuangan;
- (6) Berupaya terus menjalin komunikasi dan berkoordinasi bersama dengan Kantor Pertanahan dan pihak Desa terkait percepatan pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review Indikator Target dan Anggaran BPKAD Kabupaten Sidoarjo dilakukan Tahun 2022, dimana hasil review tersebut terdokumentasi pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dan digunakan sebagai pedoman dalam menentukan anggaran setiap tahunnya yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Review dilakukan dari hasil evaluasi capaian target masing-masing indikator tahun sebelumnya, adanya perubahan peraturan perundang-undangan, adanya bencana pandemi Covid-19 serta kondisi keuangan daerah. Berikut kami sajikan review terhadap rancangan awal RKPD Tahun Anggaran 2022 (setelah rasionalisasi) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Tabel 2.7 sebagai berikut:

Tabel 2.7

Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2022 (setelah rasionalisasi)

Rancangan awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					
Kode	Program/kegiatan/ sub. kegiatan	Lokasi	Indikator	Targe t capai an Renst ra	Pagu indikator (dlm ribuan)	Kode	Program/kegiatan/sub . kegiatan	Lokasi	Indikator	Target capaian Renstra	Pagu indikator (dlm ribuan)
02.0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan			02.0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan		
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah			2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah		
02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan		9.565.979.122	02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan		9.565.979.122
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)			2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		
06.0 1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Cetak dan Penggandaan yang tersedia		27.932.239	06.0 1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Cetak dan Penggandaan yang tersedia		27.932.239
06.0	Penyediaan Bahan		Jumlah BBM yang disediakan		256.600.000	06.0	Penyediaan Bahan		Jumlah BBM yang disediakan		256.600.000

2	Logistik Kantor								
06.0 4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		24.286.050	2	06.0 4	Logistik Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	24.286.050
06.0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu		10.085.000	06.0 8	06.0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	10.085.000
06.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		2.400.000	06.0 6	06.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	Jumlah bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	2.400.000
06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		157.434.978	06.0 2	06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	162.434.978
06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		806.822.139	06.0 9	06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	715.295.697
09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			09	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dilakukan pemeliharaan	Persentase barang milik daerah yang dilakukan pemeliharaan	

09.0 1	Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara	47.500.000	09.0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara	70.000.000
09.0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	180.000.000	09.0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	254.000.000
07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah luas gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi		07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan jenis BMD yang diadakan	
07.0 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	772.468.000	07.0 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	300.000.000
		Jumlah mobil angkutan barang yang				Jumlah mobil angkutan barang	

		diadakan						yang diadakan	
07.1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	563.068.000	07.1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	580.600.650		
07.0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleur yang diadakan	117.942.325	07.0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleur yang diadakan	159.061.625		
08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran		08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran			
08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar	947.466.60	08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar	969.376.600		
		Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar				Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar			
		Jumlah tenaga non ASN yang terbayar				Jumlah tenaga non ASN yang terbayar			
08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	566.280.000	08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	566.280.000		
08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	1.150.000	08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	1.500.000		

2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan		2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				a. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan			
		b. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti							b. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti			
01.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen PD yang dievaluasi	55.000.000	01.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Jumlah dokumen PD yang dievaluasi		60.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	a. Prosentase OPD yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan berbasis SAP (Akrual)							a. Prosentase OPD yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan berbasis SAP (Akrual)			
		b. Persentase OPD yang tepat waktu penyerapan anggaran sesuai anggaran yang kas yang ditetapkan							b. Persentase OPD yang tepat waktu penyerapan anggaran sesuai anggaran yang kas yang ditetapkan			
		c. Ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah							c. Ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah			

2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah		2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah			
03.0 4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang tersusun	731.095.000	03.0 4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang tersusun		689.975.700	
03.0 2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah bintek pengelolaan keuangan	275.125.000	03.0 2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah bintek pengelolaan keuangan		275.125.000	
2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase SPM yang diterbitkan SP2D		2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			
02.1 0	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi	Jumlah Buku Juknis Penatausahaan Keuangan yang diterbitkan	245.695.478	02.1 0	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang	Jumlah Buku Juknis Penatausahaan Keuangan yang diterbitkan		245.695.478	

	Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan						Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				
2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						Tersusunnya dokumen reparda/perda APBD,Raperda/Perda PAPBD, Pedoman pelaksanaan APBD	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Tersusunnya dokumen reparda/perda APBD,Raperda/Perda PAPBD, Pedoman pelaksanaan APBD
01.0 9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			466.893.750			Jumlah Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran yang disusun/ditetapkan	01.0 9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Jumlah Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran yang disusun/ditetapkan
01.0 8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang			177.055.670			Jumlah dokumen Raperda/Perda dan Raperbup/Pebup PAPBD yang Tersusun	01.0 8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah dokumen Raperda/Perda dan Raperbup/Pebup PAPBD yang Tersusun
											466.893.750
											177.055.670

	Penjabaran Perubahan APBD																					
01.0 7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen Raperda/Perda dan Raperbup/Perbup APBD yang tersusun	855.695.648	01.0 7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					Jumlah dokumen Raperda/Perda dan Raperbup/Perbup APBD yang tersusun											867.406.627	
2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu dalam penyaluran dana darurat mendesak, penyaluran dana bagi hasil kabupaten, penyaluran bantuan keuangan, penyaluran subsidi		2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					Persentase ketepatan waktu dalam penyaluran dana darurat mendesak, penyaluran dana bagi hasil kabupaten, penyaluran bantuan keuangan, penyaluran subsidi												
04.0 9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase ketepatan waktu dalam penyaluran dana darurat dan mendesak	38.910.000.000	04.0 9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak					Persentase ketepatan waktu dalam penyaluran dana darurat dan mendesak												38.910.000.000
04.0 8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase ketepatan waktu dalam perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	498.190.294.100	04.0 8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					Persentase ketepatan waktu dalam perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan												581.226.999.306
04.0	Penyusunan	Persentase ketepatan	2.520.000.000	04.0	Penyusunan					Persentase ketepatan												5.880.000.000

7	Kebijakan dan Alokasi Subsidi	waktu dalam penyaluran subsidi		7	Kebijakan dan Alokasi Subsidi	waktu dalam penyaluran subsidi	
04.1 0	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu dalam penyaluran dana bagi hasil kabupaten/kota	102.727.621.096 6	04.1 0	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu dalam penyaluran dana bagi hasil kabupaten/kota	102.727.621.096
2.01	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	a. Prosentase pemindahtanganan BMD yang diproses melalui lelang umum b. Prosentase aset tetap (tanah) dengan dokumentasi legal c. Prosentase OPD yang tepat waktu dalam penyampaian aporan BMD		2.01	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	a. Prosentase pemindahtanganan BMD yang diproses melalui lelang umum b. Prosentase aset tetap (tanah) dengan dokumentasi legal c. Prosentase OPD yang tepat waktu dalam penyampaian aporan BMD	
2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	a. Prosentase dokumen Laporan Barang milik Daerah (BMD) yang sesuai ketentuan b. Prosentase laporan pemanfaatan BMD sesuai ketentuan c. Prosentase pemindahtanganan		2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	a. Prosentase dokumen Laporan Barang milik Daerah (BMD) yang sesuai ketentuan b. Prosentase laporan pemanfaatan BMD sesuai ketentuan c. Prosentase pemindahtanganan	

01.0 7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Bpkad	Jumlah berkas usulan sertifikat tanah milik daerah yang memenuhi syarat dan diterima oleh BPN	976.725.500	01.0 7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah berkas usulan sertifikat tanah milik daerah yang memenuhi syarat dan diterima oleh BPN															3.391.100.000
01.1 0	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan	Bpkad	Jumlah laporan usulan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah yang diproses, hasil penilaian BMD yang dipindahtangkalan	1.221.937.800	01.1 0	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang	Jumlah laporan usulan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah yang diproses, hasil penilaian BMD yang dipindahtangkalan															782.144.996

01.0	Barang Milik Daerah												
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Bpkad	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disediakan	506.210.500	01.0	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disediakan					413.690.000

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo tidak bersentuhan langsung terhadap pelayanan masyarakat. Namun, dalam melaksanakan fungsi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo berupaya untuk transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Bahwa pembangunan daerah merupakan dasar dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di daerah tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi.

Adapun Visi dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri adalah "Terkemuka dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif"

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif antara lain :

1. Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif.

Partisipatif merupakan perwujudan penyusunan penganggaran daerah yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan.

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

3. Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien

Efektif merupakan pencapaian keluaran dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan target.

Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertinggi.

4. Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel.

Akuntabel merupakan perwujudan pelaporan keuangan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah yang kompetitif.

Kompetitif merupakan perwujudan pengelolaan keuangan yang berkualitas dan dapat diperbandingkan dengan yang lain.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Visi RPJMD yang merupakan Visi Kepala Daerah terpilih harus sejalan dengan Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025. Adapun Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo adalah **"Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera, dan Madani"**. Sehubungan dengan itu, maka rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 ini adalah **"Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan"**.

Untuk mendorong tercapainya Visi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo, maka peran dari BPKAD Kabupaten Sidoarjo terletak pada misi 1 (satu) yakni **"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha"**.

Untuk menjawab tujuan, indikator tujuan dan sasaran yang tertera pada RPJMD, maka setiap PD wajib menjabarkan melalui tujuan dan sasaran PD. Secara rinci tujuan dan sasaran dapat diuraikan pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tujuan : Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Sasaran : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel.

antara lain :

1. Persentase Laporan Keuangan OPD yang sesuai SAP;
2. Persentase Aset Tetap Terdokumentasi Legal.

Indikator : Opini atas audit BPK

Tabel 3.1
Tujuan, Indikator dan Target

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target capaian kinerja										Formulasi Permufungan / Penjelasan	Sumber Data	Penanggungjawab Data	Indikator Sasaran	Penanggungjawab Data	Sasaran																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							12	13	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1.	Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Opini atas laporan BPK	W	TP	W	TP	W	TP	W	TP	W	TP	W	TP	W	TP	W	TP	W	TP	W	TP	21	22	23	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target capaian kinerja										Indikator Sasaran	Penanggung Jawab Data	Sumber Data	Formulasi Perhitungan / Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab Data															
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2							2	2	2	2											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23											
			1. Tanah berupa Serifikat (diterbitkan oleh BPN) 2. Kendaraan Bermotor berupa BPKB (diterbitkan oleh Satiantas Polri) 3. Peralatan Mesin Lainnya berupa Berita Acara Serah terima																														
			Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan perangk at daerah										a. Nilai SAK IP											Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	Sekretaria t, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan & Akuntansi, Bidang Aset								
			34, 16 (9 4,1 0%)										b. Nilai IRB	36, 3 (1 00 %)	36, 3 (1 00 %)	36, 3 (1 00 %)	36, 3 (1 00 %)	36, 3 (1 00 %)	36, 3 (1 00 %)	36, 3 (1 00 %)	36, 3 (1 00 %)	Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia	Hasil PMPRB	Sekretaria t, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan & Akuntansi, Bidang Aset									

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target capaian kinerja						Formula Perhitungan / Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab Data												
			2	2	2	2	2	2				Indikator Sasaran											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD telah disusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun, rencana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

a. Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah
2. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
3. Pengamanan Barang Milik Daerah

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

a. Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
2. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

b. Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
2. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

c. Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub kegiatan :

1. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
2. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
3. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

d. Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota

2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
3. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
4. Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- b. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- e. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :
 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 2. Pengadaan Mebel
- f. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja Tahun 2023 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif. Rancangan Akhir Renja program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1

Kode	Uraian/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prestasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendidikan				Kategori Sasaran	Profilan Mula Rencana Tahun 2024		Pemerintah Daerah Penanggung Jawab
						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Page Indikatif	
								Nasional	Daerah				
5 02	UNSUR PRUKANG URUSAN PERHIMPATAN KEUANGAN			643,193,732,164								787,987,268,075	
5 02 01	PROBANG URUSAN PERHIMPATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pengguna layanan masyarakat	Person	14,522,419,930	Person							80 Person	16,484,115,187
5 02 01 2.0 1	Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kegiatan Perangko Daerah	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti dan jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan	Rekomendasi dan Tahapan	9,900,000	Rekomendasi dan Tahapan							1 Rekomendasi dan 2 Tahapan	7,682,900
5 02 01 2.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangko Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangko Daerah	2 Dokumen	5,900,000	2 Dokumen							2 Dokumen	7,682,900
5 02 01 2.0 2	Administrasi Keanggotaan Perangko Daerah	Persentase realisasi anggaran perangko daerah	Person	9,211,381,210	Person							80 Person	11,511,727,833
5 02 01 2.0 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	9,211,381,210	Orang							68 Orang	11,511,727,833
5 02 01 2.0 5	Administrasi Keanggotaan Perangko Daerah	Persentase pegawai yang mengikuti pelatihan/kemahasiswaan/keberbekerjaan	Person	48,000,000	Person							5 Person	220,000,000
5 02 01 2.0 5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Fraksi yang Mendukung Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berkecukupan dan Fraksi yang Mendukung Pendidikan dan Pelatihan	68 Orang	48,000,000	68 Orang							68 Orang	220,000,000
5 02 01 2.0 6	Administrasi Umum Perangko Daerah	Tingkat kepuasan pengguna layanan masyarakat	Person	1,834,892,620	Person							80 Person	2,346,121,837
5 02 01 2.0 6	Penyediaan Komposisi Insidasi Layanan/Penerangan dan Bantuan Kantor	Jumlah Paket Komposisi Insidasi Layanan/Penerangan dan Bantuan Kantor	1 Paket	31,001,307	1 Paket							1 Paket	29,073,963
5 02 01 2.0 6	Penyediaan Fasilitas dan Perangko Kantor	Jumlah Paket Fasilitas dan Perangko Kantor yang disediakan	1 Paket	287,018,412	1 Paket							1 Paket	293,128,660

5 02 01 2.0 04 0	Penyediaan Bahan Logistik/Center	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	228,000,000	Kab. Sidoarjo, Sumas Kecamatan, Sumas Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pertumbuhan Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan tatakelola pemerintahan yang baik dengan pemanfaatan ICT	Pegawai	1 Paket	31,048,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.0 05 0	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan		1 Paket	23,215,000	Kab. Sidoarjo, Sumas Kecamatan, Sumas Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pertumbuhan Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan tatakelola pemerintahan yang baik dengan pemanfaatan ICT	Pegawai	1 Paket	29,401,890	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.0 06 0	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan yang Disediakan	792 Dokumen		2,200,000	Kab. Sidoarjo, Sumas Kecamatan, Sumas Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pertumbuhan Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan tatakelola pemerintahan yang baik dengan pemanfaatan ICT	Pegawai	792 Dokumen	6,016,120	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.0 08 0	Fasilitas Kegiatan Tim	Jumlah Laporan Fasilitas/Kegiatan Tim	4 Laporan	1,280,000		Kab. Sidoarjo, Sumas Kecamatan, Sumas Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pertumbuhan Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan tatakelola pemerintahan yang baik dengan pemanfaatan ICT	Pegawai	4 Laporan	1,220,280	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 09 2.06	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi/RKD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi/RKD	4 Laporan	1,271,000,000		Kab. Sidoarjo, Sumas Kecamatan, Sumas Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pertumbuhan Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan tatakelola pemerintahan yang baik dengan pemanfaatan ICT	Pegawai	4 Laporan	1,986,175,240	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pasang Urutan Pemeliharaan Daerah	Jumlah dan Jenis BMD yang diadukan	Unit	35 Unit	475,003,100						36 Unit	71,196,524	
5 02 01 08 2.07	Pengadaan Mobil	Jumlah Paket Mobil yang Disediakan		2 Unit	79,860,000	Kab. Sidoarjo, Sumas Kecamatan, Sumas Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pertumbuhan Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan tatakelola pemerintahan yang baik dengan pemanfaatan ICT	Pegawai	2 Unit	3,927,780	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 08 2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		32 Unit	386,143,100	Kab. Sidoarjo, Sumas Kecamatan, Sumas Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pertumbuhan Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan tatakelola pemerintahan yang baik dengan pemanfaatan ICT	Pegawai	32 Unit	87,268,740	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah	Persentase Serahmenerima jasa penunjang pemeliharaan	Persentase	80 Persen	2,105,138,000						80 Persen	1,788,764,290	
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Serahmenerima	Jumlah Laporan Serahmenerima	4 Laporan		2,000,000	Kab. Sidoarjo, Sumas Kecamatan, Sumas Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pertumbuhan Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan tatakelola pemerintahan yang baik dengan pemanfaatan ICT	Pegawai	4 Laporan	1,998,500	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		688,000,000	Kab. Sidoarjo, Sumas Kecamatan, Sumas Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pertumbuhan Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan tatakelola pemerintahan yang baik dengan pemanfaatan ICT	Pegawai	4 Laporan	688,188,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	4 Laporan	1,511,138,000		Kab. Sidoarjo, Sumas Kecamatan, Sumas Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pertumbuhan Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan tatakelola pemerintahan yang baik dengan pemanfaatan ICT	Pegawai	4 Laporan	1,401,869,990	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

5 02 01 2.09	Pemeliharaan Bangun BIK Daerah Pemungjuran Pemeliharaan Daerah	Dibudayakan	Person	Person	645,135,000				(PAD)	Palayanan Publik	permanefastan ICT				
5 02 01 01 2.09	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pengkondisian Perorangan Dinas Kantoran BIKD Jabatan	Persentase kurang mllkanech yang dibukab pemeliharaan	Person	100 Person		Kab. Sidoarjo, Semas Kecamatan, Semas Kabupaten	PERDAPAT AN ABLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Peltukuhkum Dan Transformasi Palayanan Publik		Pegawai	3. Penguatan tetakole pemertabah yang baik dengan pemertastan ICT	9 Unit	127,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 06 2.09	Pemeliharaan Penulahan dan Mecha Lainnya	Jumlah Perolehan dan Hasil Lainnya yang Dipelbah	Person	9 Unit	303,835,000	Kab. Sidoarjo, Semas Kecamatan, Semas Kabupaten	PERDAPAT AN ABLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Peltukuhkum Dan Transformasi Palayanan Publik		Pegawai	3. Penguatan tetakole pemertabah yang baik dengan pemertastan ICT	6 Unit	239,900,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 09 2.09	Pemeliharaan/Rehab Mecha/Gedung Kantor Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelbah/Rehablket	1 Gedung	1 Gedung	219,500,000	Kab. Sidoarjo, Semas Kecamatan, Semas Kabupaten	PERDAPAT AN ABLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Peltukuhkum Dan Transformasi Palayanan Publik		Pegawai	3. Penguatan tetakole pemertabah yang baik dengan pemertastan ICT	1 Gedung	181,600,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan waktu penyempulan Dekumee Rancangan KUA/PPAS /Perbah KUA/PPAS ketepatan waktu penyempulan Dekumee/aperbah APSD/APSD Ketepatan waktu penyempulan Dekumen Raport APSD/APSD Pemertane realisasi penyempulan bebagai transfer	Stata n Stata n Statu n Pers on Pers on	Tepat Waktu Stata n Tepat Waktu Stata n Tepat Waktu Stata n 100 Person 100 Person	822,887,815,235							777,209,614,666			
5 02 02 2.01	Kontrol dan Penyempulan Anggaran Daerah	Persentase Dekumee anggaran daerah yang tertuan Persentase Dekumee kufjahan yang tertuan	Person n Person n	Person n Person n	1,435,665,360							100 Person 100 Person	1,936,756,566		
5 02 02 07 2.01	Kontrol dan Penyempulan Perbah APBD dan Perbah Kepala Daerah tentang Penjabaran Daerah tentang APBD	Jumlah Perbah Deantituntang APBD dan Perbah Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6 Dekumee	1,07,415,280		Kab. Sidoarjo, Semas Kecamatan, Semas Kabupaten	PERDAPAT AN ABLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Peltukuhkum Dan Transformasi Palayanan Publik		OPD	3. Penguatan tetakole pemertabah yang baik dengan pemertastan ICT	6 Dekumee	1,288,580,664	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

5 02 02 08 2.01	Keefektifan dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Peretasan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peretasan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	1 Dokumen	0 Dokumen 6 Dokumen	215,100,000	Kab. Blora, Sema, Kacamatan, Sema, Kelerahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pelaksanaan Dan Transformasi Publik	3. Penguatan tatakelola pemerintahan yang baik dengan pemanfaatan ICT	OPD	0 Dokumen 8 Dokumen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 09 2.01	Keefektifan dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen		191,050,000	Kab. Blora, Sema, Kacamatan, Sema, Kelerahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pelaksanaan Dan Transformasi Publik	3. Penguatan tatakelola pemerintahan yang baik dengan pemanfaatan ICT	OPD	1 Dokumen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 2.02	Keefektifan dan Pengelolaan Perencanaan Daerah	Proses atau pelaksanaan APBD yang tepat waktu	Person		817,902,253						100 Person	545,096,500	
5 02 02 10 2.02	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Perencanaan dan Pelaksanaan Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub-Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Perencanaan dan Pelaksanaan Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub-Kegiatan	1 Dokumen		574,902,253	Kab. Blora, Sema, Kacamatan, Sema, Kelerahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pelaksanaan Dan Transformasi Publik	3. Penguatan tatakelola pemerintahan yang baik dengan pemanfaatan ICT	OPD	1 Dokumen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 11 2.02	Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pemertintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pemertintah Kabupaten/Kota	144 Orang		243,000,000	Kab. Blora, Sema, Kacamatan, Sema, Kelerahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pelaksanaan Dan Transformasi Publik	3. Penguatan tatakelola pemerintahan yang baik dengan pemanfaatan ICT	OPD	144 Orang	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.03	Keefektifan dan Pelaksanaan Alur dan Pelayanan Keuangan Daerah	Persentase dokumen pelayanan keuangan daerah yang diaman sesuai kebutuhan	Person		906,219,000						100 Person	1,019,872,500	
5 02 02 02 2.03	Rekonsiliasi dan Verifikasi/cek, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayar, Penerimaan-LD dan Bahan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi/cek, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayar, Penerimaan-LD dan Bahan	12 Dokumen		200,100,000	Kab. Blora, Sema, Kacamatan, Sema, Kelerahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pelaksanaan Dan Transformasi Publik	3. Penguatan tatakelola pemerintahan yang baik dengan pemanfaatan ICT	OPD	12 Dokumen	359,872,500	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 04 2.03	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Tertanggungjawab	Person		706,115,000	Kab. Blora, Sema, Kacamatan, Sema, Kelerahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pelaksanaan Dan Transformasi Publik	3. Penguatan tatakelola pemerintahan yang baik dengan pemanfaatan ICT	OPD	20 Laporan	660,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.04	Pemangjang Urusan Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase realisasi penyusunan beban transfer	Person		819,828,124,712						100 Person	773,706,119,122	
5 02 02 07 2.04	Penyusunan Kebijakan dan Akhlak Bakti	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Akhlak Bakti	4 Laporan		252,000,000	Kab. Blora, Sema, Kacamatan, Sema	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pelaksanaan Dan Transformasi Publik	3. Penguatan tatakelola pemerintahan yang baik dengan pemanfaatan ICT	OPD	4 Laporan	557,892,254,711	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

5 02 02 2.04 06	Analisis Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan	4 Laporan			687,935,891,000	Kab. Sidoarjo, Kecamatan, Semas Kelurahan	PENDAPAT AN ABLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan ketahanan pemertintah yang baik dengan pemertintahan ICT	OPD	4 Laporan	128,393,864,411	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.04 06	Pengelolaan Dana Darurat dan Bantuan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Bantuan	4 Laporan	80,000,790,000			Kab. Sidoarjo, Kecamatan, Semas Kelurahan	PENDAPAT AN ABLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan ketahanan pemertintah yang baik dengan pemertintahan ICT	OPD	4 Laporan	87,800,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4 Laporan		109,348,442,512		Kab. Sidoarjo, Kecamatan, Semas Kelurahan	PENDAPAT AN ABLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan ketahanan pemertintah yang baik dengan pemertintahan ICT	OPD	4 Laporan	2,820,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BAKAWAMILIK DAERAH	Presentase saat tetap tanah yang telah bersertifikat Presentase OPD yang tepat waktu dalam penyempulan laporan Presentase pemertintahan BMD yang diproses Presentase pemertintahan BMD yang diproses Presentase pemertintahan BMD yang diproses melalui belang sunam	Pers on on on on on	88,13 Pers 100 Pers 100 Pers 100 Pers 100		6,883,489,029						88,13 Pers 100 Pers 100 Pers 100 Pers 100	3,473,640,200	
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah PD yang tepat waktu dalam penyempulan laporan Presentase pemertintahan BMD yang diproses Presentase pemertintahan BMD yang diproses Presentase pemertintahan BMD yang diproses melalui belang sunam	PD Pers on on on	48 PD 100 Pers 100 Pers 100		6,883,489,029						48 PD 100 Pers 100 Pers 100	3,473,640,200	
5 02 03 2.01 05	Pencatatan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pencatatan Barang Milik Daerah	2 Laporan		897,680,000		Kab. Sidoarjo, Kecamatan, Semas Kelurahan	PENDAPAT AN ABLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan ketahanan pemertintah yang baik dengan pemertintahan ICT	OPD	2 Laporan	619,800,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 07	Penggunaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penggunaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4,171,438,000			Kab. Sidoarjo, Kecamatan, Semas Kelurahan	PENDAPAT AN ABLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan ketahanan pemertintah yang baik dengan pemertintahan ICT	OPD	1 Laporan	2,224,850,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

8 02 03 2.01 40	Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Perbaikan/Perawatan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Perbaikan/Perawatan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1,01,884,020	Kab. Sidoarjo, Kecamatan, Sumbu, Kelurahan	PENDAPAT AN ABJI DAERAH (PAD)	Mempertuat Maksimal Pembiayaan Dan Transferransi Pajajuan Publik	2. Program Indikasi pemertikan yang baik dengan pemertikan ICT	OPD	1 Dokumen	831,875,200	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
TOTAL											797,187,280,276	
TOTAL											843,183,732,184	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya mengalir kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan teknis tahunan, sebagai implementasi dari Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Renstra BPKAD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026.

Disusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 diharapkan menjadi bahan bagi Aparatur BPKAD Kabupaten Sidoarjo dalam mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan bersama untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Sidoarjo, April 2022

Pit. KEPALA BADAN DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO


CHUSNUL INAYAH, SE

NIP. 19720317 199602 2 001